

ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN PDRB TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA BARAT

Yolanda Yulianti^{1*}, Nucke Widowati Kusumo Projo²

¹yolandayly23@gmail.com, ²nuckewidowati@upnvj.ac.id

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

**Penulis Korespondensi*

Received: 26 July 2025

Revised: 20 August 2025

Published: 31 August 2025

Abstract

Poverty is one of the major problems faced by governments, particularly in developing countries. Indonesia continues to struggle with poverty issues, particularly in West Papua Province. Despite its rich natural resources and potential to support economic growth, West Papua Province has yet to effectively optimize these resources, resulting in high poverty levels in the region. This study aims to evaluate the impact of the Human Development Index, Open Unemployment Rate, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on poverty levels in the 13 regencies/cities of West Papua Province from 2017 to 2022. The analysis reveals several key findings: first, there is a significant negative relationship between the Human Development Index and poverty; second, there is a significant negative relationship between the Open Unemployment Rate and poverty; and third, there is a significant positive relationship between GRDP and poverty.

Keywords: *Human Development Index; Open Unemployment Rate; GRDP; Poverty*

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu problema bagi pemerintahan khususnya pada Negara yang sedang berkembang, Indonesia masih mengalami tantangan dalam menangani permasalahan kemiskinan yang belum berhasil hingga saat ini terutama pada Provinsi Papua Barat. Meskipun memiliki sumber daya alam yang kaya dengan potensi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Provinsi Papua Barat belum mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif hal ini yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh faktor-faktor Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dari 2017 hingga 2022. Temuan analisis menunjukkan beberapa hasil penting: pertama, hubungan negatif yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan; kedua, hubungan negatif yang signifikan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan; dan ketiga, hubungan positif yang signifikan antara PDRB dan Kemiskinan.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Tingkat Pengangguran Terbuka; PDRB; Kemiskinan

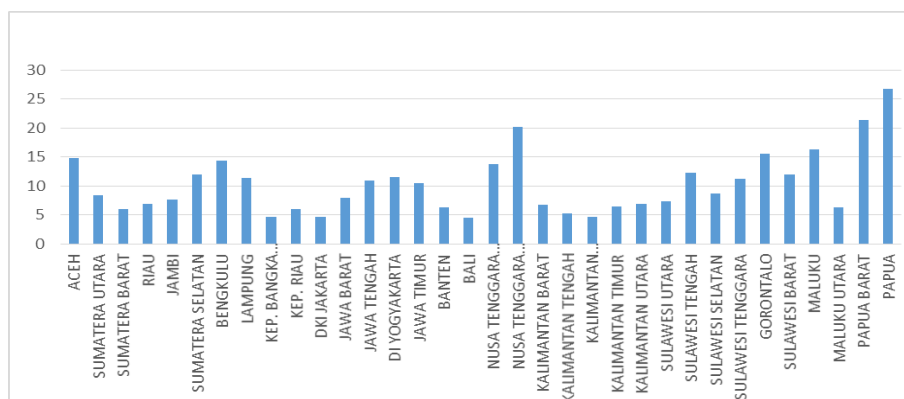
1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia, seperti yang dinyatakan melalui Pembukaan Undang Undang 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, yang dapat didefinisikan melalui kondisi yang sudah matang dalam segi material, struktural dan sosial alhasil dapat mengembangkan kehidupan yang layak untuk melaksanakan fungsi sosial dan ekonomi. Kemiskinan adalah salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan umum di Indonesia (Andykha dkk, 2018). Namun demikian, menanggulangi dan mengurangi kemiskinan merupakan problema yang cukup rumit untuk segera dapat dipecahkan khususnya pada negara yang sedang berkembang secara eplisit. Padahal jika dilihat jumlah pada kemiskinan di negara berkembang, misalnya pada penduduk di Indonesia memiliki jumlah ada 135,5 juta penduduk yang menjadi pekerja, ada 40,67 juta orang bekerja di sektor pertanian, sektor perhutanan dan sektor perikanan (BPS, 2020).

Kemiskinan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat yang dapat diukur melalui besaran proporsi penduduk suatu Negara dengan tingkat kesejahteraan yang dipunyai lebih rendah berdasarkan standar tertentu. Standar yang umum dipakai dalam mengukur kesejahteraan dalam konteks kemiskinan salah satunya adalah pendapatan rerata dalam sebulan sejumlah Rp400.000 per orang. Demikian setara dengan standar nasional sejumlah \$1.9 per kapita dalam sehari, hal tersebut tidak jauh disebut dengan garis kemiskinan ekstrim. Salah satu argument yang menjelaskan bagaimana laju penurunan kemiskinan dapat melambat terdapat dalam argument “*the last mile problem*” mengungkapkan bahwa kemiskinan akan berkurang lebih lambat jika tingkat kemiskinan sudah relatif rendah. Begitupun sebaliknya, kemiskinan yang masih tinggi akan lebih mudah mengalami penurunan (Yusuf, 2018).

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, terus berjuang dalam mengatasi masalah kemiskinan yang sudah berlangsung lama namun masih belum terselesaikan hingga saat ini. Perihal ini lebih rumit dikarenakan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia alhasil menduduki peringkat ke - 4 di dunia. Pentingnya mengurangi jumlah penduduk miskin dianggap sebagai ukuran keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Meskipun upaya telah dilakukan, masalah kemiskinan masih tetap ada, terutama di daerah pedesaan yang seringkali sulit dijangkau oleh program-program bantuan. Kesejahteraan suatu daerah dapat dinilai dengan melihat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, menunjukkan apakah pendapatan penduduk cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perihal ini terkait dengan keberhasilan pada pembangunan ekonomi setiap wilayah jika dilihat melalui sisi ekonominya. Pertumbuhan ekonomi muncul sebagai elemen penting untuk mencapai keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di setiap wilayah (Ardian dkk, 2021).

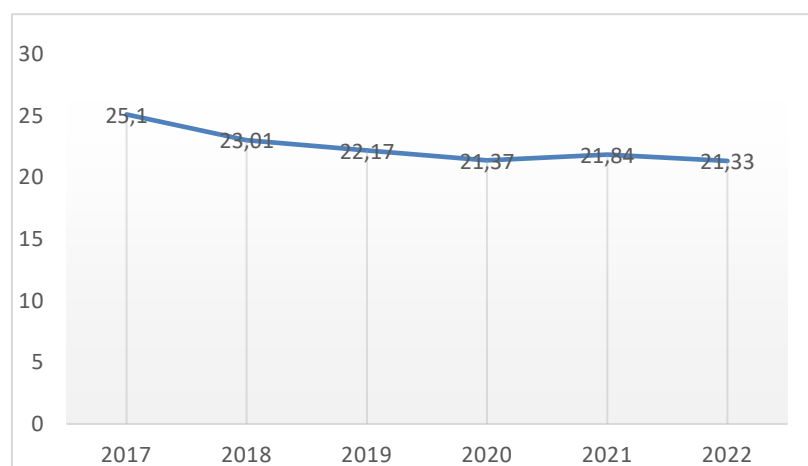
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia



Sumber: Badan pusat Statistik 2022

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2022, Provinsi Papua hadir sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 26,8%, diikuti oleh Provinsi Papua Barat sebesar 21,43%, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 20,23% menduduki peringkat ketiga dalam hal tingkat kemiskinan. Provinsi Papua Barat sebagai suatu wilayah di Indonesia yang masih mengalami tantangan yang cukup besar dalam mengatasi masalah kemiskinan. Meskipun upaya terus-menerus, masalah kemiskinan di daerah tersebut masih belum terselesaikan hingga saat ini. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2004, rendahnya pendapatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai suatu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kondisi geografis dan kebijakan daerah, khususnya di Papua Barat.

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat



Sumber: *Badan Pusat Statistik 2022*

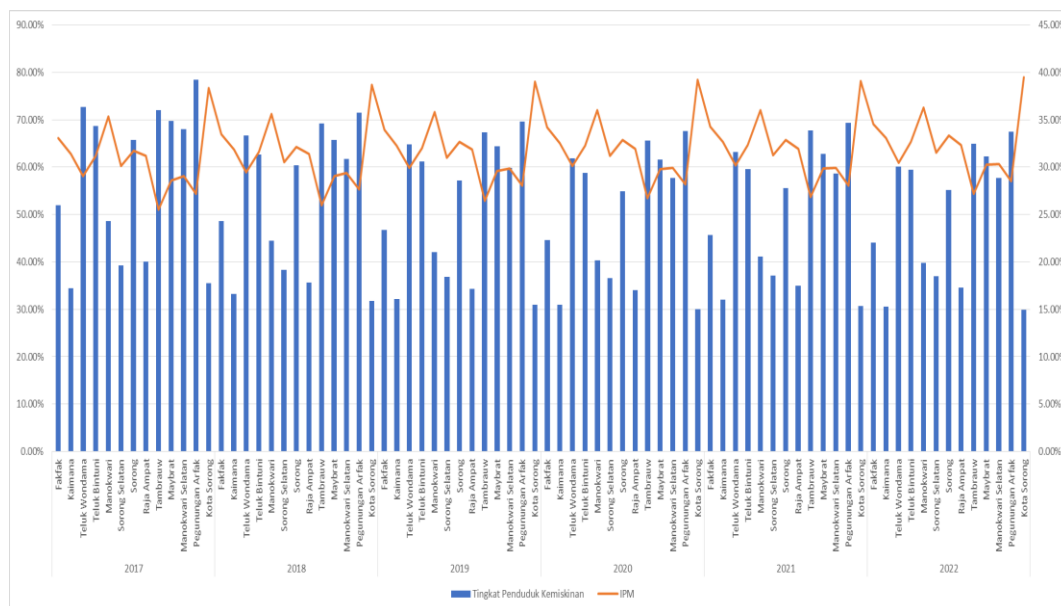
Gambar. 2 menunjukkan pada periode tahun 2017 hingga 2022 provinsi Papua Barat terus mengalami penurunan dari segi presentase penduduk miskin. Pada saat tahun 2017 tercatat bahwa presentase penduduk miskin sejumlah 25.1% mengalami penurunan saat tahun 2018 sejumlah 23.01%, saat tahun 2019 menurun menjadi 22.17% dan terus menurun hingga mencapai 21.37% saat tahun 2020, namun saat tahun 2021 meningkat sejumlah 21.84% dan menurun kembali sejumlah 21.33% pada saat tahun 2022. Kemiskinan pada provinsi Papua Barat menjadi permasalahan yang cukup pelik. Penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat selama beberapa periode kebelakang masih belum signifikan. Sepanjang pembangunan yang terjadi di Papua Barat, tampaknya belum menghasilkan taraf hidup masyarakat yang sejahtera untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Papua Barat berada di garis depan tingkat kemiskinan nasional dan menempati peringkat sebagai provinsi paling miskin kedua di negara ini.. (Wibawa, 2019)

Papua Barat ialah provinsi yang terdiri dari 13 kabupaten/kota yang mempunyai aset sumber daya alam terutama hutan tropis yang melimpah, mencakup sekitar 9.730.550 hektar. Kota Sorong merupakan pusat perusahaan pengolahan minyak yang memiliki 350 ladang minyak dan gas bumi di provinsi ini. Sumber daya laut yang dipunyai juga sangat beragam yang menjadi rumah bagi ada 1.800 jenis ikan karang dan ada 600 jenis karang keras. Tidak hanya itu, Papua Barat menjadikan sektor pariwisata sebagai primadona seperti wisata baharinya yang terkenal akan keindahannya di kabupaten Raja Ampat, Taman Nasional Teluk Cendrawasih dan Teluk Wondama.

Pemanfaatan sumber daya alam tersebut seharusnya dapat memberikan kontribusi positif kepada peningkatan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Kendala aksesibilitas yang dihadapi oleh warga pedesaan dalam mencari sumber pendapatan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka lebih besar dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Ini menampilkan betapa pentingnya percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta perlunya kesetaraan dalam pembangunan sebagai upaya meminimalisir kemiskinan di Papua Barat, terutama di daerah pedesaan (Indonesia, 2022).

Faktor yang menjadi penyebab utama kemiskinan dapat dilihat melalui sumber daya manusia pada suatu wilayah tersebut (Handayani N. , 2022). Badan Statistik Pusat, penilaian sumber daya manusia ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (HDI), yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan manusia di seluruh negara dan wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) awalnya diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dan secara konsisten dimasukkan dalam Laporan Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia sebagai suatu parameter pengukuran kualitas SDM, yakni masyarakat atau penduduk di setiap wilayah.

Gambar 3. Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat

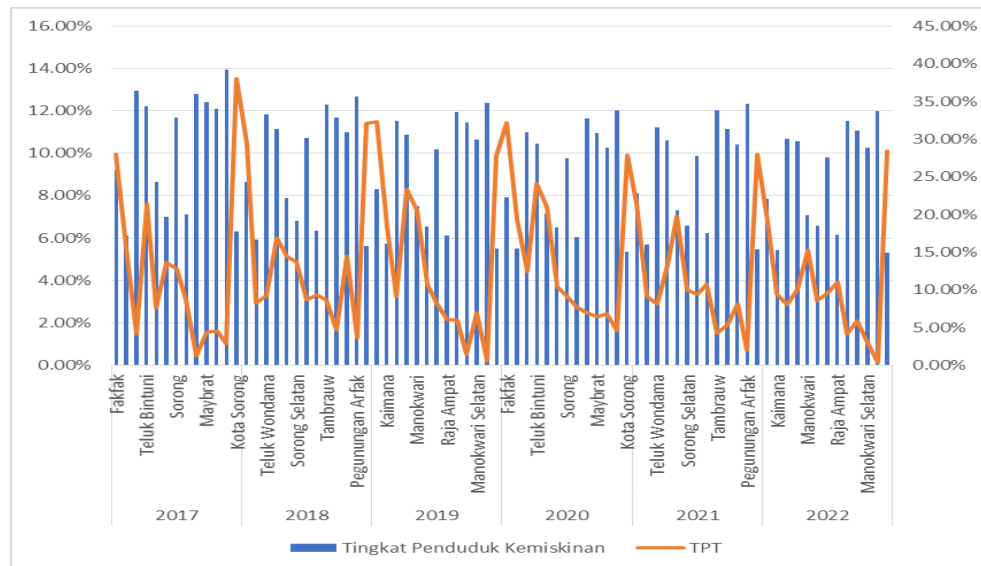


Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Meskipun Papua Barat merupakan wilayah yang memiliki banyak keterbatasan dan tingkat kesejahteraan yang rendah, mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi telah menjadi prestasi besar. Selama enam tahun terakhir, terdapat peningkatan yang berkelanjutan dalam nilai IPM Papua Barat. Ini ialah sukses yang patut diapresiasi, mengingat kondisi terbatas dan dampak pandemi yang sedang berlangsung. Jika dibandingkan dengan wilayah paling timur di Indonesia, Papua Barat telah mencatat pertumbuhan yang positif dalam IPM dengan tren kenaikan yang stabil, meskipun nilai IPM masih berada di peringkat kedua terendah secara nasional dan hanya sedikit lebih baik daripada Papua. Pengangguran juga dapat memengaruhi kepada tingkat kemiskinan karena akan menimbulkan permasalahan dalam masyarakat yang berdampak terhadap aspek ekonomi dan sosial. Bilamana tingkat

pengangguran tinggi maka pendapatan yang dihasilkan oleh warga akan berkurang. Kondisi ini akan memiliki tekanan dari sisi ekonomi hingga dapat memengaruhi kepada masyarakat dan rumah tangga (Dahlia, 2020)

Gambar 4. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat

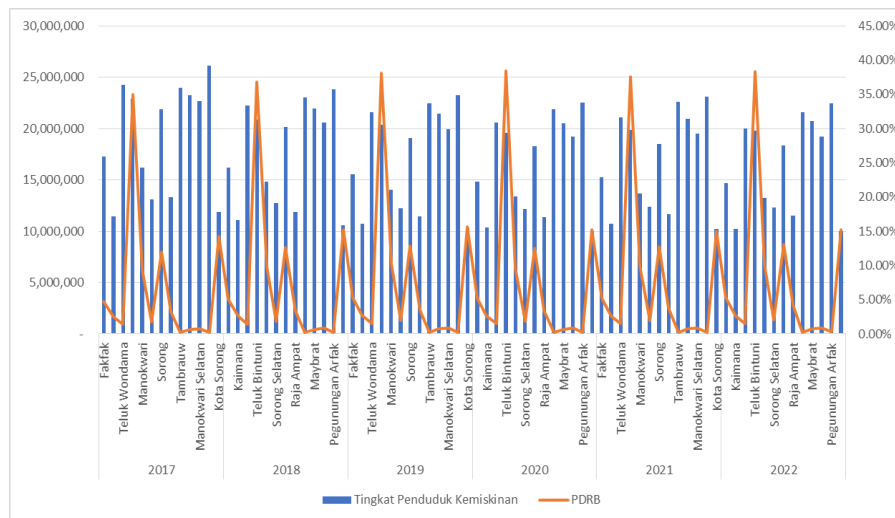


Sumber: *Badan Pusat Statistik 2022*

Selama periode 6 tahun kebelakangan ini di mana jumlah keseluruhan Tingkat Pengangguran Terbuka pada skala nasional telah berkurang, TPT Papua Barat juga mengalami tren penurunan. Terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 menandakan yaitu tingkat pengangguran cenderung menurun, kemudian kembali meningkat saat 2020 dikarenakan pandemi yang sangat berdampak pada tingkat pengangguran di Indonesia salah satunya adalah Papua Barat. Kemudian kembali mengalami penurunan hingga dua tahun kebelakangan ini. Kondisi ketenagakerjaan di Papua Barat makin membaik dengan cukup banyaknya penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri pengolahan alhasil mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi di 2022. Dengan itu disimpulkan program pemerintah menghasilkan lapangan pekerjaan yang dapat menekan bertambahnya jumlah pada tingkat pengangguran akibat pandemi.

Salah satu faktor dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk yaitu memiliki peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB merupakan indeks penting untuk mengenali keadaan perekonomian suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan PDB per kapita dapat diukur dengan menggunakan PDRB suatu daerah dan membaginya dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Indeks PDB per kapita mengacu pada nilai kontribusi setiap orang terhadap produksi barang dan jasa selama periode satu tahun. PDRB dibagi menjadi harga berlaku dan harga tetap. Penggunaan PDRB yang diperhitungkan dengan harga konstan bertujuan untuk memahami tingkat pertumbuhan ekonomi sebenarnya dari satu tahun ke tahun selanjutnya, tanpa terpengaruh oleh faktor harga. Nilai tambah produk dan jasa biasanya ditentukan pada tahun referensi dengan memanfaatkan harga yang berlaku selama tahun tersebut.

Gambar 5. Produk Domestik Regional Bruto dan Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Papua Barat



Sumber: *Badan Pusat Statistik 2022*

Gambar. 5 menggambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari 2017 hingga 2022. Salah satu penyumbang PDRB terbesar di provinsi Papua Barat ialah kabupaten Teluk Bintuni. Kekayaan kabupaten Teluk Bintuni dapat dipresentasikan melalui transaksi ekspor dan impor. Perihal ini tidak terlepas pada tingginya ekspor komoditas gas alam cair yang dihasilkan di kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian Kota Sorong juga memberikan kontribusi terbesar kedua karena letaknya strategis sebagai pusat industri untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Kota Sorong juga dikenal dengan sebutan Kota Minyak yang berada di bagian barat provinsi Papua alhasil kekayaan alam minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten dengan distribusi PDRB terendah pada provinsi Papua Barat karena masih menjunjung tingginya adat istiadat pada kelompok masyarakat yang menempati wilayah tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan dapat menyebabkan kesenjangan sosial dengan pendapatan yang dihasilkan sehingga memengaruhi dampak ekonomi pada suatu wilayah (Leonita & Sari, 2019). Kemiskinan massal sudah sering sekali terjadi pada setiap negara yang baru merdeka sejak perang dunia ke II yang hanya berfokus kepada permasalahan ekonomi, dimana sejak zaman itu terdapat faktor yang mengidentifikasi penyebab negara miskin pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Ragnar Nurkse (1953), seorang ekonom yang terkenal mengemukakan pandangannya tentang penyebab kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan muncul sebagai akibat dari ketidaksetaraan dalam akses terhadap modal. Pendapatan yang rendah akan menghambat kemampuan untuk menabung dan berinvestasi. Kurangnya investasi akan memperburuk keterbelakangan ekonomi, dan siklus ini akan berlanjut. Dalam teori ini, diterangkan bagaimana kemiskinan dapat terjadi.

Ragnar Nurkse (1953) dalam teorinya menyatakan bahwa ketidakseimbangan ini membuat kondisi menjadi sulit bagi Negara Negara berkembang untuk keluar dari kemiskinan karena kendala kendala tersebut saling memperkuat satu sama lain. Untuk memecahkannya, Nurkse menekankan pentingnya investasi baik dalam infrastruktur dan sumber daya manusia

(pelatihan dan pendidikan). Kemudian pentingnya diversifikasi ekonomi dan pengembangan pasar internal dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada komoditas primer. Teori ini telah menjadi landasan bagi banyak kebijakan pembangunan di Negara Negara berkembang. Secara umum, kemiskinan adalah konsep yang kompleks dan sulit untuk diukur secara tepat. Secara garis besar, dapat diamati bahwa ada dua kategori utama tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan absolut dan relatif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 1990, Indeks Pembangunan Manusia diluncurkan oleh PBB yang sebagian besar diterima melalui Laporan Pembangunan Manusia Pertama oleh Progran Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa atau lebih dikenal UNDP. UNDP (*United Nations Development Programme*) mengemukakan bahwa pembangunan manusia merupakan proses guna memperluas berbagai pilihan bagi penduduk artinya manusia diberikan berbagai pilihan mengenai upaya dalam memenuhi kebutuhan dia agar hidupnya menjadi lebih baik meliputi berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan budaya (UNDP, 1990). UNDP merupakan sebuah lembaga yang memiliki peranan dalam mempromosikan dan mengembangkan IPM. Mereka terus melakukan penelitian dan mengumpulkan data untuk menghasilkan laporan tahunan tentang IPM, yang memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan manusia di berbagai negara. IPM memiliki elemen utama yaitu:

1. Harapan hidup yang panjang,
2. Pendidikan, dan
3. Pengeluaran rill per kapita

Sejak diperluas, IPM telah membantu mengubah pandangan tentang pembangunan, menggeser fokus dari pendapatan ekonomi semata menjadi kemakmuran manusia yang lebih komprehensif. Sebagai alat yang dipakai secara luas, IPM terus menjadi bagian penting dalam perdebatan pembangunan global dan analisis sosial-ekonomi. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melibatkan tiga komponen utama: indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Adapun rumus perhitungan Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS adalah:

$$IPM = \sqrt[3]{Ikesehatan \times Ipendidikan \times Ipengeluaran} \times 100 \dots\dots\dots (1)$$

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka mewakili porsi angkatan kerja di wilayah atau negara bagian tertentu yang secara aktif mencari pekerjaan dan tersedia untuk bekerja, namun belum dapat berhasil menemukan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang mengalami peningkatan makin tinggi mengindikasikan suatu kondisi yang sedang mengalami kesulitan karena tidak semua tenaga kerja berhasil mendapatkan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran juga berdampak kepada status penduduk yang hanya berperan sebagai konsumen tanpa memberikan kontribusi sebagai faktor produksi yang berpartisipasi dalam menghasilkan sebuah output. Hal tersebut digambarkan dengan rendahnya kemakmuran masyarakat akibat banyaknya pengangguran akan meningkatkan peluang mereka untuk terjebak dalam kemiskinan (Ayu, 2018).

Rumus dasar untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka yaitu:

$$TPT = \frac{Jumlah\ Pengangguran}{Jumah\ Angkatan\ Kerja} \times 100 \% \dots\dots\dots (2)$$

Tingkat pengangguran terbuka biasanya diukur dalam bentuk persentase untuk memudahkan perbandingan antara berbagai wilayah, negara, atau periode waktu. Tingkat

pengangguran terbuka adalah indikator penting dalam analisis pasar tenaga kerja dan dipakai oleh pemerintah, lembaga statistik, dan analis ekonomi untuk memantau kondisi ketenagakerjaan dan ekonomi suatu negara atau wilayah. Tingginya tingkat pengangguran dapat menampilkan masalah ekonomi dan sosial, sementara tingkat yang rendah biasanya dianggap sebagai tanda ekonomi yang sehat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran makroekonomi yang ditentukan dengan mempertimbangkan semua barang dan jasa dalam wilayah tertentu selama periode waktu tertentu, biasanya selama satu tahun. John Maynard Keynes menyatakan bahwa PDRB didefinisikan sebagai jumlah pendapatan yang dihasilkan dalam satu wilayah tertentu secara keseluruhan, termasuk pendapatan yang dihasilkan dari bekerja dan keuntungan modal. Tujuan utama PDRB adalah untuk mengukur dan memantau aktivitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah serta mengevaluasi kemakmuran masyarakat yang ada di dalamnya. PDRB memiliki beberapa elemen utama yang dapat mencerminkan sumber daya pendapatan dan pengeluaran yang telah dikelola dalam suatu wilayah atau Negara. Berikut rumus yang dapat dipakai dalam menghitung PDRB:

$$PDRB = C + I + G + (X - M) \dots\dots\dots (3)$$

Dimana:

C = Konsumsi Rumah Tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor dan M = Impor

PDRB dapat diukur dalam bentuk pengeluaran dan pendapatan yang didapat oleh faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut. Rumus di atas adalah rumus pengeluaran, yang sering digunakan untuk mengukur PDRB suatu wilayah. Perbedaan antara ekspor (X) dan impor (M) dalam rumus ini dikenal sebagai "ekspor bersih" dan mencerminkan saldo perdagangan internasional. Ketika ekspor bersih meningkat karena nilai tukar yang menguntungkan dan pendapatan dari sektor ekspor meningkat, hal tersebut dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Namun, jika biaya impor meningkat karena nilai tukar yang lemah, harga barang-barang kebutuhan pokok bisa naik dan sangat berdampak pada masyarakat miskin yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar. Dapat disimpulkan bahwa fluktuasi nilai tukar dapat mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap perdagangan internasional. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi daya saing suatu negara di pasar global, biaya impor dan ekspor. Di sisi lain, stabilitas nilai tukar dapat mendukung pertumbuhan PDB yang berkelanjutan, meningkatkan lapangan kerja, dan menyediakan lebih banyak sumber daya untuk program-program sosial yang mengurangi kemiskinan (Desmintari et al, 2024)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi sangat penting digunakan dalam sebuah penelitian. Populasi didefinisikan sebagai kumpulan seluruh elemen atau sejumlah atribut yang jadi subjek penelitian. Populasi merujuk pada keseluruhan elemen yang jadi subjek penelitian yang memiliki karakteristik yang serupa. Populasi dapat terdiri dari individu dalam suatu kelompok, peristiwa, atau

objek yang akan diteliti (Handayani R. , 2020). Penelitian ini menggunakan beberapa populasi antara lain Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB, serta Kemiskinan. Sampel pada penelitian ini adalah 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat pada tahun 2017 hingga 2022. Dapat disimpulkan bahwa total 78 sampel data yang komprehensif dimasukkan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pada studi ini menggunakan data sekunder atau tidak langsung yang didapat melalui berbagai sumber yang asalnya dari instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistika (BPS), buku, laporan pemerintah, artikel, jurnal-jurnal ilmiah yang sudah terpublikasi mengenai kemiskinan, IPM, TPT dan PDRB menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022 sebagai acuan yang dipakai untuk mengolah data pada studi ini. Data-data tersebut berupa angka yang di analisis dengan memakai analisis statistik (Padang & Damayanti, 2022). Sumber data pada penelitian ini bersumber dari BPS karena merupakan lembaga resmi yang mengumpulkan dan mengelola data statistik di Indonesia. Beberapa variabel penting yang didapat datanya pada studi ini ialah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB, menampilkan fokus penelitian pada isu-isu ekonomi, sosial, dan pembangunan di wilayah Papua Barat. Terkait pengumpulan data, peneliti melakukan dua cara penjabaran data untuk dapat memenuhi dan mendukung kebutuhan penelitian yaitu studi pustaka melibatkan pencarian, pemahaman, analisis, dan sintesis informasi dari literatur yang telah ada untuk mendukung atau memberikan landasan teoritis bagi penelitian seperti beberapa buku, situs, *webiste* dan jurnal penelitian terdahulu serta studi dokumentasi dengan melibatkan penggunaan data yang telah ada sebelumnya, yang biasanya disediakan oleh sumber-sumber eksternal seperti lembaga pemerintah (contohnya BPS RI) atau organisasi non-pemerintah.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel sebagai metode fundamental untuk pengumpulan dan pengawasan data. Analisis data panel menggabungkan data deret waktu dari 2017 hingga 2022, serta data *cross-sectional* yang diperoleh dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Data panel ini dipakai peneliti untuk melaksanakan analisis perubahan atau variabilitas fenomena yang diteliti secara lebih komprehensif, baik dalam dimensi spasial (berdasarkan lokasi Kabupaten/Kota) maupun dimensi waktu (berdasarkan periode tahun) (Baltagi, 2005).

Maka penyusunan model persamaan yaitu:

$$Kemiskinan_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 LNPDRB_{it} + e_{it} \dots\dots (1)$$

Keterangan:

Kemiskinan _{it}	: Kemiskinan
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
IPM _{it}	: Indeks Pembangunan Manusia
TPT _{it}	: Tingkat Pengangguran Terbuka
LNPDRB _{it}	: PDRB
e	: <i>error term</i>
i	: 13 Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat
t	: Time series (2017-2022)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Obs	W	V	z	Prob>z
Uhat	78	0.89778	6.872	4.217	0.00001

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 1, nilai *P value* 0.00001 diperoleh dari melakukan uji normalitas. Hasil ini menunjukkan bahwa 0.00001 kurang dari 0.05, mengarah pada kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Perlu dicatat bahwa hasil ini diharapkan, sesuai hukum bilangan besar, ketika ukuran sampel melebihi 30, normalitas umumnya diasumsikan (*Ajija, 2011*)

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	IPM	TPT	LNPDRB
IPM	1.0000		
TPT	0.7785	1.0000	
LNPDRB	0.7953	0.6691	1.0000

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 2, ditemukan bahwa tidak ada nilai korelasi di antara variabel yang melebihi 0,9. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terpengaruh oleh multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Antar Periode Waktu

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
F(1, 12) = 15.282
Prob > F = 0.0021

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3 dengan melakukan uji autokorelasi antar periode waktu (*time series*) memiliki probabilitas senilai 0.0021. Dapat disimpulkan bahwa 0.0021 kurang dari 0.05. Artinya terdapat masalah autokorelasi antar periode. Selanjutnya dengan melakukan uji autokorelasi antar *cross section* memakai nilai korelasi dapat dilihat apakah terdapat masalah atau tidak. Berikut hasil hipotesis yang telah dilakukan dalam pengujian melalui uji autokorelasi antar *cross section* adalah dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Antar Cross Section

Pesaran's test of cross sectional independence = 5.797, Pr = 0.0000

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4 dengan melakukan uji autokorelasi antar *cross section* memiliki probabilitas senilai 0.0000. Dapat disimpulkan bahwa 0.0000 kurang dari 0.05. Artinya terdapat masalah autokorelasi antar *cross section*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki permasalahan autokorelasi alhasil harus ditangani.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedasitas

Lagrange Multiplier LM Test	=	52.57921
Degrees of Freedom	=	12.0
P-Value > Chi2(12)	=	0.00000
Sumber:Data Diolah (2024)		

Berdasarkan tabel 5 dengan melakukan uji heteroskedasitas memiliki P-Value chi2 senilai 0.0000. Dapat disimpulkan bahwa 0.0000 kurang dari 0.05. Artinya terdapat masalah heteroskedasitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa studi ini memiliki permasalahan heteroskedasitas alhasil harus ditangani.

Teknik Penentuan Model ***Uji Hausman***

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

<i>Effect Test</i>	<i>Prob.</i>
Chi square (3)	6.77
Prob>chi2	0.0795

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 6 dengan melakukan uji hausman memiliki Prob.chi2 senilai 0.0795. Dapat disimpulkan bahwa 0.0795 lebih besar dari 0.05. Maka, keputusan yang diambil adalah terima H_1 dengan REM sebagai model terpilih pada penelitian ini.

Interpertasi Model

Tabel 7. Hasil Regresi *Feasible Generalized Least Square* (FGLS)

KEMISKINAN	Coef.	Std. Err.	z	P> z 	[95% Conf. Interval]	
IPM	-1.058558	.0976285	-10.84	0.000	-1.249906	-.8672092
TPT	-.19391	.0866134	-2.24	0.025	-.3636692	-.0241508
LNPDRB	1.958746	.4163776	4.70	0.000	1.142661	2.774831
_cons	67.50239	3.238337	20.84	0.000	61.15537	73.84942

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 7, pengujian ini dianggap telah mengatasi permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi. Diperoleh hasil regresi model FGLS dengan persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 67.50239 - 1.058558 (IPM_{it}) - 0.19391 (TPT_{it2}) + 1.958746(LNPDRB_{it3})$$

Dari persamaan tersebut dapat diterangkan bahwa :

1. Nilai konstanta memiliki nilai sejumlah 67.50239. Perihal ini menunjukkan jika variabel independen memiliki nilai sejumlah 0, maka nilai Kemiskinan adalah sama dengan 67.50239.
2. Koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar -1.058558. Hal ini menandakan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif kepada kemiskinan. Dapat diterangkan bahwa jika Indeks Pembangunan Manusia meningkat sejumlah satu satuan dan nilai variabel lain adalah tetap, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sejumlah -1.058558.
3. Koefisien variabel Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar -0.19391. Hal ini menandakan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif kepada kemiskinan. Dapat diterangkan bahwa jika Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat sejumlah satu satuan dan nilai variabel lain adalah tetap, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sejumlah -0.19391.
4. Koefisien variabel LNPDRB memiliki nilai sebesar 1.958746. Hal ini menandakan bahwa variabel LNPDRB berpengaruh positif kepada kemiskinan. Dapat diterangkan bahwa jika LNPDRB meningkat sejumlah satu-satuan dan nilai variabel lain adalah tetap, berarti kemiskinan akan meningkat sejumlah 1.958746.

Uji Signifikansi

Uji z (Pengujian Secara Parsial)

Pada tabel 7, model FGLS melahirkan beberapa hipotesis hasil sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap Variabel Indeks Pembangunan Manusia
 Nilai probabilitas z variabel IPM adalah 0.000. Ini berarti bahwa nilai 0.000 lebih kecil daripada 0.05, dapat disimpulkan secara parsial IPM dianggap memiliki pengaruhnya bersignifikan terhadap tingkat Kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis H_1 yang telah diajukan oleh peneliti dapat diterima atau dianggap akurat.
2. Pengujian terhadap Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka
 Nilai probabilitas z variabel TPT adalah 0.025. Ini berarti bahwa nilai 0.025 lebih kecil daripada 0.05, dapat disimpulkan secara parsial TPT dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis H_2 yang telah diajukan oleh peneliti dapat diterima atau dianggap akurat.
3. Pengujian terhadap Variabel LNPDRB
 Nilai probabilitas z variabel LNPDRB adalah 0.000. Ini berarti bahwa nilai 0.000 lebih kecil daripada 0.05, dapat disimpulkan secara parsial LNPDRB dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis H_3 yang telah diajukan oleh peneliti dapat diterima atau dianggap akurat.

Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F

<i>Effect Test</i>	Prob.
Wald Chi2 (3)	293.79
Prob > F	0.0000

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 8 dengan melakukan uji f memiliki probabilitas senilai 0.0000. Artinya 0.0000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan yakni ketiga variabel independen yaitu IPM, TPT dan LNPDRB secara bersama - sama memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan.

Uji Koefisien Determinasi (R-Squared)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Within</i>	0.7664
<i>Between</i>	0.5360
<i>Overall</i>	0.5420

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 9 dengan melakukan uji koefisien determinasi memiliki nilai R-squared sebesar 0.5420. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada studi ini, yaitu IPM, TPT dan PDRB mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 54.20 persen terhadap Kemiskinan. Sebanyak 45.80 persen sisanya menandakan telah diterangkan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Analisis Ekonomi dan Pembahasan

Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Didasarkan pada hasil uji regresi data panel pada variabel IPM pada studi ini memiliki hasil pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama yang telah dibangun oleh peneliti dapat diterima. Ketika IPM di suatu wilayah telah meningkat maka kemiskinan akan mengalami penurunan. Semakin naik nilai IPM maka kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat akan cenderung berkurang, perihal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Nurkse (1953) yang menjelaskan bahwa pentingnya investasi kepada sumber daya manusia yang berkualitas dapat menurunkan angka kemiskinan karena mereka memiliki tingkat produktivitas yang tinggi disertai dengan bekal pendidikan dan pelatihan alhasil dapat berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

Hasil studi ini memiliki keterkaitan yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari & Sulia (2018) yang menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut juga selaras terhadap hipotesis dan teori yang dipakai pada studi ini bahwa ketika IPM meningkat maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan atau dapat diartikan bahwa IPM yang baik akan mengindikasikan kepada produktivitas yang berkualitas diiringi dengan tiga dimensi IPM (kesehatan, pendidikan, hidup yang layak) alhasil mampu bersaing dengan masing masing individu untuk menghasilkan pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang layak. Dengan memerhatikan hal hal yang membentuk IPM yang berkualitas maka IPM cenderung dapat menurunkan angka kemiskinan.

Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka pada penelitian ini memiliki hasil pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua yang telah dibangun oleh peneliti dapat diterima. Ketika TPT di suatu wilayah telah meningkat maka kemiskinan akan mengalami penurunan. Semakin naik nilai TPT maka kemiskinan akan cenderung berkurang, perihal ini dibuktikan bahwa tidak setiap individu yang menganggur termasuk dalam golongan orang miskin. Faktor-faktor seperti adanya anggota keluarga dengan pendapatan yang cukup tinggi alhasil dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi mereka yang menganggur dan adapun individu yang tergolong dalam tingkat pengangguran terbuka ialah individu yang bekerja di sektor informal. Sebagian besar dari mereka bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan bekerja paruh waktu dengan penghasilan. Beberapa telah membuka usaha sendiri bahkan sudah berkembang hingga mencapai akses pasar yang lebih besar, termasuk dapat bersaing di pasar internasional yang salah satunya

dengan memenuhi syarat sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peralihan ke barang dan jasa halal dapat meningkatkan kesuksesan perusahaan hingga generasi yang mendatang dan berdampak baik untuk membantu mengurangi pengangguran dan pada akhirnya dapat mengatasi masalah kemiskinan (Ariefiara et al, 2022).

Hasil studi ini memiliki keterkaitan yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Sekar Ayu (2018) yang menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut juga selaras terhadap hipotesis dan teori yang dipakai pada studi ini bahwa tidak semua individu yang mengalami pengangguran selalu berada dalam kondisi kemiskinan karena hubungan TPT dan kemiskinan tidak berlangsung mutlak. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi status ekonomi seseorang seperti golongan yang sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha atau telah memperoleh pekerjaan tetapi belum memulai bekerja merupakan kondisi yang termasuk dalam kategori pengangguran. Alhasil perlunya peran pemerintah di setiap wilayah agar meningkatkan sektor informal yang mampu menurunkan angka kemiskinan.

Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan

Variabel PDRB pada studi ini memiliki hasil pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga yang telah dibangun oleh peneliti dapat diterima. Ketika PDRB di suatu wilayah telah mengalami kenaikan maka kemiskinan akan mengalami peningkatan. Makin naik nilai PDRB maka kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat akan mengalami peningkatan. Secara umum, keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan PDRB, tetapi efektivitasnya juga harus dinilai dari kemampuannya dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat membawa dampak positif kepada kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, hasil analisis menandakan yaitu distribusi PDRB cenderung tidak merata alhasil dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi.

Hasil studi ini memiliki keterkaitan yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andykha, dkk (2018) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut juga selaras terhadap hipotesis dan teori yang dipakai pada studi ini bahwa ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan golongan masyarakat berpenghasilan tinggi. Dalam perihal ini bisa menyimpulkan jika pertumbuhan ekonomi tanpa disertai upaya pemerataan dapat menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi di suatu wilayah.

5. SIMPULAN

Didasarkan pada hasil analisis penelitian dapat dihasilkan kesimpulan yaitu Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, ditunjukkan oleh kenaikan Indeks Pembangunan Manusia yang memiliki korelasi dengan peningkatan produktivitas yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Jelas bahwa tidak semua individu yang mengalami pengangguran adalah bagian dari demografi yang miskin. Namun, seorang individu tanpa pekerjaan sudah pasti tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil sehingga dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan. Penurunan tingkat kesejahteraan ini secara langsung akan berkontribusi pada prevalensi kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi dengan kemampuannya untuk mengurangi Kemiskinan. Ada

kekhawatiran bahwa Produk Domestik Bruto Regional, jika tidak dimanfaatkan secara efektif dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi, akibatnya mengarah pada tingkat kemiskinan yang meningkat. Peningkatan PDRB yang terjadi di Papua Barat seharusnya diiringi oleh adanya upaya perlindungan oleh pemerintah sehingga mampu berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, B. N., & Azizah, A. N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Sibatik Journal*, 1-22.
- Ajija, S. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amin, Dkk, N. F. (2023). Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1-17.
- Andykha Dkk, R. (2018). Analisis Pengaruh Pdrb, Tingkat Pengangguran, Dan Ipm Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah . *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 1-11.
- Ardian Dkk, R. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1-12.
- Ari , A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1-24.
- Ariefiara Et Al, D. (2022). Halal Food Certification, Financial Performance, And Sustainability Reporting: Comparative Study Of Food And Beverage Firms In Malaysia And Indonesia. *Agbioforum*, 12-22.
- Ayu, D. S. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ipm, Jumlah Penduduk Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2010-2015). 1-24.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis Of Panel Data*. The Atrium: British Library Cataloguing In Publication Data.
- Basuki , A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bps. (2018). Profil Kemiskinan Provinsi Papua Barat Maret 2018. *Berita Resmi Statistik*, 1-8.
- Dahlia, D. (2020). Wakaf Produktif Mengentaskan Pengangguran. 1-11.
- Dahroni. (No.L1 Th.VI/Desember 1992). Strategi Memerangi Kemiskinan Di Negara Sedang Berkembang. *Forum Geografi*, 1-14.
- Desmintari Et Al. (2024). Volatility Of International Trade And Exchange Rates In Some South Asian Countries Using The Ardl-Ecm Approach. *Journal Of Propulsion Technology*, 2842-2850.
- Fajriah, N. A. (2021). Analysis Of The Effect Of Gross Regional Domestic Product, Number Of Population, Regional Minimum Wage Open Unemployment Rate, And Human Development Index On Poverty In 2010-2020 East Java Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 171-187.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2020). *Basic Econometrics*. Newyork: Mcgraw-Hil.

- Handayani, N. (2022). Pengaruh Ipm, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Diponegoro Journal Of Economics*, 1-11.
- Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Hasibuan Dkk, R. R. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1-11.
- Indonesia, B. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2022*. Papua Barat: Bi.Go.Id.
- Kadji, Y. (2013). Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya. 1-7.
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh Pdrb, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1-8.
- Ni Komang, N., & Savitri, K. S. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Ipm, Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2018-2022. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1-9.
- Nurlita Dkk, C. A. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Miskin Di Samarinda. *Journal Feb*, 1-19.
- Padang, R. N., & Damayanti, S. R. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Journal Fakultas Ekonomi Universitas Dr Soetomo*, 1-19.
- Parulian, T. R., & Hukom, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah. *Manajemen Kreatif Jurnal (Makreju)* , 1-11.
- Perbendaharaan, K. K. (2018). Kajian Fiskal Regional Tahun 2018 Provinsi Papua Barat. 1-135.
- Praja Dkk, R. B. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Dan An Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Dki Jakarta. *Ecoplan*, 1-9.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. U. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengagguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1-24.
- Situmorang, M. (2020). Pengaruh Seleksi Jabatan Pimpinan Dan Pengembangan Karir Terhadap Kualitas Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Magister Ilmu Administrasi* 38-52 , 38-52.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Undp. (1990). *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press.
- Wibawa, A. (2019). Kajian Fiskal Regional Tahun 2018 Provinsi Papua Barat. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan*, 1-135.
- Yusuf, A. A. (2018). *Keadilan Untuk Pertumbuhan*. Bandung: Unpad Press.